

EVALUASI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PT. SIRTU KARYA UTAMA KELURAHAN BULURI KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU

Agung Syaputra^{1)*}, Intam Kurnia²⁾, Yulizar Pramudika Tawil³⁾.

¹**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
agunglikumariaagung@gmail.com

²**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
kintam.68@gmail.com

³**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
yulizarpramudika@gmail.com

ABSTRAK

Penulis memilih untuk meneliti kebijakan TJSL PT. Sirtu Karya Utama karena adanya ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan dengan regulasi yang berlaku, Dan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di PT. Sirtu Karya Utama Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan analisis data, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dari William N. Dunn (2003: 429-438) terdiri dari 6 indikator yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Tanggung Jawab Sosial lingkungan Perusahaan Di PT. Sirtu karya Utama Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu, belum terlaksana dengan baik. dapat dilihat dari Efektivitas,yaitu ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, pada indikator Efisiensi, pelaksanaannya di lapangan, yang mengakibatkan tujuan perda yang ingin dicapai yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan menjadi kurang efektif dan efisien, pada indikator Kecukupan, dikarenakan tidak adanya evaluasi dan revisi terhadap kebijakan tersebut akan menghambat terjadinya perbaikan berkelanjutan dalam praktik perusahaan di lapangan, pada indikator Perataan, diakibatkan oleh ketidakpedulian pemerintah dalam mendorong partisipasi perusahaan dan melindungi kepentingan masyarakat sekitar tambang, Pada indikator responsivitas PT. Sirtu Karya Utama, bersama dengan pemerintah kota, dinilai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat terkait dampak negatif dari aktivitas pertambangan, pada indikator Ketepatan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Perusahaan

ABSTRACT

The researcher chose to study the Corporate Social Responsibility (CSR) policy of PT. Sirtu Karya Utama due to the inconsistency between the implemented programs and the applicable regulations. This research aims to evaluate the Company's Environmental Social Responsibility Policy at PT. Sirtu Karya Utama in Buluri Village, Ulujadi District, Palu City. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The informants in this study numbered 6 people. Data collection techniques used interviews, observations, and documentation. Data analysis involved data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used from William N. Dunn (2003: 429-438) consists of 6 indicators: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. Based on the research results, it shows that the Company's Environmental Social Responsibility Policy at PT. Sirtu Karya Utama in Buluri Village, Ulujadi District, Palu City, has not been implemented well. This can be seen in terms of Effectiveness, namely the company's non-compliance with government-established regulations, in the Efficiency indicator, its implementation in the field, which results in the less effective and efficient achievement of the objectives of the regional regulation, which is for the welfare of the community and sustainable development, in the Adequacy indicator, due to the lack of evaluation and revision of the policy, which will hinder the occurrence of continuous improvement in the company's practices in the field, in the Equity indicator, caused by the government's indifference in encouraging company participation and protecting the interests of the community around the mine, in the Responsiveness indicator, PT. Sirtu Karya Utama, together with the city government, is considered less responsive to community complaints regarding the negative impacts of mining activities, and in the Appropriateness indicator, there is an inconsistency between the established policy and practices in the field.

Keyword: *Evaluation of Corporate Environmental Social Responsibility Policies*

Submisi: 03-05-2025

Diterima: 03-05-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

Pesatnya pembangunan di berbagai wilayah Indonesia telah meningkatkan permintaan akan bahan galian tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengembangan wilayah, permintaan akan bahan konstruksi seperti pasir dan batu telah meningkat. Pertambangan batuan menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Jinurain, 2017).

TJSP diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Sentosa Sembiring, 2012).

Keberadaan perusahaan pertambangan batuan di suatu daerah diharapkan membawa kemajuan bagi masyarakat sekitarnya. Namun, selain dampak positif, kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan pertambangan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, termasuk mengganggu kehidupan masyarakat, menghasilkan debu, dan mengubah lanskap alam, perlu adanya evaluasi kebijakan terkait tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan pertambangan guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan lingkungan juga terjaga dengan baik.

Di Kota Palu sendiri, tepatnya di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, terdapat sepuluh perusahaan yang beroperasi di tambang galian C. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada satu perusahaan, yaitu PT. SIRTU KARYA UTAMA, untuk mengevaluasi kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana PT. SIRTU KARYA UTAMA memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya, serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan di Kelurahan Buluri.

Perusahaan Tambang galian C yang terletak di beberapa wilayah Kota Palu, mulai dari Kelurahan Buluri dan sekitarnya, menjadi salah satu faktor pemicu memperberat peningkatan jumlah penderita penyakit Infeksi saluran pernafasan (Ispa) penyebab penyakit ispa pada beberapa Masyarakat di kelurahan dikarenakan aktivitas pertambangan yang menghasilkan produk debu tentu mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar area pertambangan. Dari data yang dihimpun puskesmas kelurahan tipe, tercatat pasien yang datang berobat dengan keluhan batuk atau sesak nafas pada 2022 sampai 2023 yaitu sebanyak 553 orang. dan Masyarakat merasakan keresahan dari adanya dampak aktivitas pertambangan batuan, yang menjadi masalah publik hingga saat ini

Untuk mengatur keberadaan perusahaan yang beraktivitas tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Palu sendiri sebenarnya telah merumuskan aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda yang dimaksud diharapkan bisa memaksimalkan peran perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, regulasi yang dimaksud adalah Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di PT. Sirtu Karya Utama Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi.

Evaluasi ini penting untuk mengetahui dampak dari kebijakan tersebut karena sebuah kebijakan yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan, kecuali disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun mendesain program itu sendiri.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan bahwasannya, kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Sirtu Karya Utama belum sepenuhnya dipatuhi oleh perusahaan tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan yang ada di kelurahan Buluri sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Pasal 4 Ayat 1 huruf b, Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan (TJSLP) harus menjadi bagian integral dari kebijakan manajemen serta program pengembangan perusahaan, dan setiap perusahaan yang menjalankan usahanya wajib membuat program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) serta melakukan koordinasi dengan tim fasilitasi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

Kemudian diatur lebih lanjut di Peraturan Walikota Palu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan tepatnya di pasal 4 bahwa perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) harus bergabung ke dalam forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak patuh dengan regulasi yang ada, dan juga tidak bergabungnya perusahaan tersebut ke dalam forum pelaksana berdampak pada keterbatasan program yang dilaksanakan, terutama di bidang sosial dan lingkungan program yang dilaksanakan akhirnya menjadi sangat terbatas.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang dilakukan PT. Sirtu Karya Utama cenderung bersifat simbolis. Program-program yang ada lebih fokus pada kegiatan seremonial tahunan seperti pemberian minuman dan hewan Qurban saat Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara itu, program lingkungan yang ada, yaitu "uang debu", hanya berfokus pada penanganan dampak sementara dari aktivitas pertambangan, tanpa menyentuh akar permasalahan lingkungan yang luas.

Penerapan kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di PT. Sirtu Karya Utama yang berlokasi di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu belum mencapai tingkat optimal. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengevaluasi implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan tersebut. Sebagai kerangka analisis, penelitian ini mengadopsi teori evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2003). Teori ini mengidentifikasi enam dimensi evaluasi yang relevan, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, dan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Evaluasi kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan di PT.Sirtu Karya Utama kelurahan buluri kecamatan ulujadi Kota Palu, adalah teori yang dikemukakan oleh William N Dunn. ada beberapa indikator-indikator dalam melakukan evaluasi kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yakni: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian, terdiri atas Lurah Buluri, tokoh masyarakat, masyarakat Kelurahan Buluri, dan salah satu dari pihak perusahaan PT. Sirtu. Instrumen penelitian ini, yaitu alat merekam hasil wawancara, dan pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan untuk informan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Sirtu Karya Utama yang berlokasi di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana, 2014:31-32 meliputi 4 tahapan analisis Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan menilai secara Objektif pencapaian hasil yang telah disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan Evaluasi memiliki peran sangat penting dalam mengukur keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi berbicara tentang kegiatan yang terstruktur secara jelas dan sering dilakukan sehari-hari untuk mengetahui apakah program yang telah disepakati sudah berjalan dengan baik atau belum sehingga dapat dilakukan evaluasi yang nantinya bisa menjadi informasi atau bahan acuan untuk mengambil sebuah Keputusan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan berkelanjutan, Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di PT.Sirtu Karya Utama di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu akan dibahas pada bab ini. Keberhasilan Suatu Kebijakan tergantung pada seberapa baik pelaksana kebijakan melaksanakannya. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang No 40 Pasal 74 tahun 2007 dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.

Studi evaluasi kebijakan publik tidak hanya dapat dievaluasi setelah kebijakan telah selesai dilaksanakan tetapi pada saat proses pelaksanaan kebijakan juga dapat di evaluasi. Evaluasi kebijakan yang di maksud dalam penelitian ini adalah Evaluasi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di PT.Sirtu Karya Utama di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Pada umumnya kebijakan publik dilaksanakan dengan adanya tujuan dan maksud tertentu yang dihasilkan dari suatu kebijakan itu sendiri namun jika tujuan kebijakan itu tidak terlaksana dengan baik maka dengan sendirinya program atau kegiatan dari kebijakan itu dianggap gugur atau belum maksimal. Sehingga efektifitas juga dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan dari aspek tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan tersebut. Efektivitas dalam evaluasi kebijakan ini mengacu pada seberapa jauh capaian tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan telah tercapai dalam implementasinya di PT. Sirtu Karya Utama. dilihat dari kesesuaian tujuan yang ingin dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di PT. Sirtu Karya Utama. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor PT.Sirtu Karya Utama, pelaksanaan Peraturan daerah (PERDA) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di PT. Sirtu Karya Utama sudah terlaksana tetapi belum maksimal.

Meskipun salah satu upaya perusahaan untuk menangani debu tidak berjalan efektif. Masyarakat membutuhkan program yang berkelanjutan untuk melihat perubahan nyata dalam sosial dan lingkungan mereka Program yang tidak berkelanjutan menyebabkan manfaat yang dirasakan masyarakat tidak stabil. Masyarakat merasa tidak yakin atas komitmen perusahaan dalam memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan di kelurahan Buluri. Kemudian juga perusahaan cenderung lebih fokus pada pemberian kompensasi materi (uang debu) daripada upaya preventif untuk mengatasi masalah lingkungan secara fundamental, seperti reboisasi atau pengendalian debu. Hal ini membuktikan bahwa program TJSL perusahaan dinilai ada, namun tidak semua masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Kurangnya informasi mengenai program yang telah dilaksanakan membuat masyarakat meragukan komitmen perusahaan, dan juga perusahaan dianggap kurang transparan dalam mempublikasikan program yang telah dilakukan. Hal ini menyebabkan informasi yang diterima masyarakat menjadi terbatas dan menimbulkan berbagai interpretasi.

Efisiensi masih sangatlah erat kaitannya dengan efektifitas. Apabila kita berbicara tentang efisiensi kita membayangkan mengenai penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan di PT. Sirtu karya utama kelurahan buluri kecamatan ulujadi Kota Palu dalam melaksanakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 Tentang tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan sendiri terdapat beberapa usaha-usaha yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan tersebut. Penilaian aspek efisiensi dalam penelitian ini dilihat dari aspek jumlah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam mewujudkan Peraturan Daerah.

Bersumber dari argumen informan diatas bahwa, narasumber memiliki pandangan kritis terhadap pelaksanaan program TJSL yang dilakukan oleh PT. Sirtu Karya Utama. Narasumber menilai bahwa program yang berjalan saat ini tidak efektif dan efisien dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Terdapat kesenjangan antara pandangan perusahaan dan masyarakat mengenai pelaksanaan program TJSL. Perusahaan mungkin menganggap program yang mereka jalankan sudah cukup baik, namun masyarakat di lapangan merasakan sebaliknya. Narasumber secara langsung menyalahkan perusahaan karena kurang bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari kegiatan pertambangan. Narasumber juga menyoroti rendahnya daya kritis masyarakat yang menyebabkan mereka kurang aktif dalam mengawasi dan menuntut pertanggung jawaban perusahaan. Narasumber menekankan pentingnya adanya keseimbangan antara tanggung jawab perusahaan dan kesadaran kritis masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwasannya, terdapat ketidaksesuaian antara program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang dilaksanakan oleh PT. Sirtu Karya Utama dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Program TJSL yang berjalan saat ini dinilai kurang efektif, efisien, dan tidak transparan. Perusahaan cenderung menunggu adanya proposal dari masyarakat untuk menjalankan program TJSL. Hal ini membuat inisiatif program kurang proaktif dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Masyarakat merasa kurang mendapat informasi mengenai program TJSL yang sedang berjalan. Kurangnya transparansi ini membuat masyarakat sulit untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan. Program TJSL yang dilaksanakan dinilai tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Program yang ada seringkali tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa. Dengan mengukur atau mengantisipasi sejauh mana alternatif yang ada dapat memenuhi persyaratan, nilai, atau peluang untuk pemecahan masalah, kecukupan tetap berhubungan dengan efektivitas. Kecukupan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sejauh mana program dan kegiatan TJSL yang dilaksanakan oleh PT. Sirtu Karya Utama mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau harapan masyarakat dan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas PT. Sirtu Karya Utama ini sendiri. Untuk mengetahui hasil kecukupan program sosial lingkungan yang sudah dilaksanakan PT. Sirtu Karya Utama.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwasannya kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di PT. Sirtu Karya Utama dan program yang sudah mereka laksanakan belum cukup untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan

yang ada di kelurahan Buluri, Program di bidang lingkungan yang dilakukan dinilai belum cukup untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada, terutama masalah debu yang mengganggu masyarakat. Kemudian bantuan sosial yang diberikan bersifat sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat.

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equality) erat berhubungan dengan bertindak sesuai aturan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dari paparan William N. Dunn tersebut dapat disimpulkan bahwa Perataan adalah hasil atau upaya yang didistribusikan secara adil. Jika biaya dan manfaat didistribusikan secara merata peraturan tertentu mungkin cukup efektif dan efisien. Cara untuk meratakan adalah dengan memenuhi kekurangan-kekurangan terlebih dahulu. Perataan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah distribusi manfaat yang adil dan merata dari kontribusi perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas dan fakta di lapangan dapat peneliti simpulkan bahwasannya program TJSL yang PT. Sirtu Karya Utama laksanakan masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah sekitar tambang. Masyarakat menilai bahwa mekanisme distribusi manfaat yang dilakukan perusahaan belum jelas dan transparan. Selain itu, program yang telah dilaksanakan dinilai belum berkelanjutan dan tidak merubah kondisi masyarakat yang ada di kelurahan Buluri.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas dapat dilakukan Setelah memprediksi efek yang akan terjadi jika suatu kebijakan diterapkan, maka respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya. Selain itu, tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan itu muncul dapat berupa positif berupa dukungan atau negatif berupa penolakan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan berdasarkan fakta di lapangan bahwa PT. Sirtu Karya Utama perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah debu yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangannya. Perusahaan harus segera mengambil tindakan konkret untuk mengurangi dampak debu terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terutama warga Kelurahan Buluri, khususnya yang tinggal di sekitar area operasi PT. Sirtu Karya Utama, sangat terganggu dengan masalah debu yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan, keluhan mengenai debu yang berterbangan dan merusak lingkungan telah disampaikan, namun perusahaan dinilai belum memberikan respons yang memadai.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah "Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut". Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan kebijakan lainnya (jika ada) dapat menentukan Ketepatan. Misalnya, efek tambahan yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya, baik efek positif maupun negatif yang tidak terduga, atau opsi alternatif yang dianggap lebih unggul dari implementasi suatu kebijakan sehingga kebijakan dapat bergerak lebih dinamis. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pada aspek ketepatan tersebut lebih mengarah kepada opsi pilihan dari

banyaknya opsi.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas dan fakta yang terjadi di lapangan dapat peneliti simpulkan bahwasannya masyarakat Kelurahan Buluri merasa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan oleh PT. Sirtu Karya Utama sangat tidak tepat dan tidak memenuhi kebutuhan mereka. Ketidakpuasan ini muncul dikarenakan Program yang bersifat tahunan yang dijalankan bersifat jangka pendek, sehingga tidak memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program TJSL. Hal ini mengakibatkan program yang dihasilkan tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Ketidaksesuaian program TJSL yang ada tidak menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Buluri, sehingga tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Janji kesejahteraan yang tidak terpenuhi Meskipun kebijakan TJSL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, nyatanya kondisi masyarakat di Kelurahan Buluri masih jauh dari sejahtera. Secara keseluruhan, masyarakat Kelurahan Buluri mengharapkan program TJSL yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Mereka ingin program yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata mereka dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di PT. Sirtu Karya Utama Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu belum berjalan dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, dimana ada 6 (Enam) aspek yang dijadikan tolak ukur berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori William N. Dunn Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Pada indikator Efektifitas belum terlaksana dengan baik dikarenakan yang terjadi dilapangan bahwa ketidakjelasan forum pelaksanaan TJSL. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 4, perusahaan yang menjalankan program TJSL seharusnya bergabung dalam forum pelaksanaan TJSL.

Dampak negatif seperti debu dan kerusakan jalan yang terus berlanjut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip TJSL belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.. Pada indikator ketepatan, Ketidaksesuaian antara kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan praktiknya telah mengakibatkan kebijakan dan program yang dilaksanakan menjadi kurang efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam perencanaan juga menjadi faktor yang memperparah masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan dan evaluasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, N. William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Jinurain. 2017. Evaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Dampak Pertambangan Bahan Galian Batuan (Studi Kasus) Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*, 5(2), 165–178.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Peraturan daerah kota palu nomor 13 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial lingkungan

perusahaan.

Peraturan Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial lingkungan

Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

TENTANG PENULIS

Nama : Agung Syaputra
Nomor Induk Mahasiswa : B101 20 274
Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 31 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jln, Malonda Kel Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu
Nomor Telepon : 082348679503